SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA PEGAWAI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : SHALHHAKKA DIMAR FARRAKHY

NPM : 125239217

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2025

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: SHALHHAKKA DIMAR FARRAKHY
NPM	: 125239217
PROGRAM / JURUSAN	: S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA PEGAWAI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Jakarta, 15 Juni 2025
Pembimbing

Sofia Prima Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pengesahan

Nama	:	SHALHHAKKA DIMAR FARRAKHY
NIM	:	125239217
Program Studi	:	AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Title	:	The Effect of Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Funds, Employee Expenditure, and Capital Expenditure on Regional Fiscal Independence

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 12-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. SUFIYATI, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. SOFIA PRIMA DEWI, S.E., M.Si., Ak., CA.
3. VIDYARTO NUGROHO, S.E., M.M., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
SOFIA PRIMA DEWI, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK/NIP: 10199015

Jakarta, 12-Juli-2025

Ketua Program Studi

HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan skripsi ini mampu terlaksana dengan baik berkat adanya orang-orang yang senantiasa mendukung dan memotivasi dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan ketulusan kepada

1. Ibu Sofia Prima Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA. sebagai dosen pembimbing peneliti yang memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyusun skripsi ini dan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan bimbingan dari awal hinga akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA (Aust.), CSRS, ACPA sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
4. orang tua peneliti, Bapak Drs. Subkhan, M.A.P. dan Ibu Yayuk Hastuti Feny serta adik peneliti, Aura Faza Shalhzahra, dan anggota keluarga lainnya;
5. sahabat kecil peneliti, Fakhrurrozi Asy-syafiq, S.Kom., Fery Hakim Burhanuddin, A.Md.Ak., Nauval Rifdan Hananzah, S.T., M.T., Milenia Nadia Afifah Puspitasari, S.Si., Rosanti Amalia Adha Jauhari, S.Psi., dan Ikhlasul Amal, A.Md.A.Pj.;
6. *Swastamita*, *Mangan*, *Yuhuu*, dan sahabat-sahabat peneliti lainnya;
7. *DIPA K/L*, *Onion Kids*, dan rekan kerja peneliti lainnya di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

8. seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, inspirasi, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini maupun selama menempuh pendidikan di Universitas Tarumanagara.

Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini mampu bermanfaat bagi pihak yang membaca. Terima kasih.

Jakarta, 15 Juni 2025

Peneliti,

Shalhhakka Dimar Farrakhy

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA PEGAWAI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

The objective of this study is to determine the effect of local own-source revenue, revenue sharing funds, employee expenditure, and capital expenditure towards regional fiscal independence. This research uses secondary data from local governments in East Java Province over a five-year period from 2019 to 2023. The sample is selected using a non-probability sampling method with purposive sampling technique resulting in 39 local governments. The data is processed by using Eviews 12 SV Lite. Outputs obtained from this study indicates that local own-source revenue has no positive effect, balancing funds and employee expenditure have no negative effect, and capital expenditure has a positive effect on the regional fiscal independence.

Keywords**:** *Regional Fiscal Independence, Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Funds, Employee Expenditure, Capital Expenditure*

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun dari 2019 s.d. 2023. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dan data yang diperoleh berjumlah 39 pemerintah daerah. Data diolah dengan menggunakan Eviews 12 SV Lite. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif, dana perimbangan dan belanja pegawai tidak berpengaruh negatif, serta belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Belanja Modal

DAFTAR ISI

Halaman

SKRIPSI i
TANDA PENGESAHAAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Permasalahan 1
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 4
3. Batasan Masalah 5
4. Rumusan Masalah 5
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 7
A. Teori *Signalling* 7
B. Definisi Konseptual Variabel 8
1. Kemandirian Keuangan Daerah 8
2. Pendapatan Asli Daerah 10
3. Dana Perimbangan 11
4. Belanja Pegawai 12
5. Belanja Modal 13
C. Kaitan Antar Variabel 13
1. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 13
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 15
3. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 16

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah17
D. Penelitian Terdahulu 19
E. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 22
BAB III METODE PENELITIAN 24
A. Desain Penelitian 24
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel 25
C. Operasionalisasi Variabel 26
1. Variabel Dependen 27
2. Variabel Independen 27
D. Asumsi Analisis Data 30
1. Uji Normalitas 30
2. Uji Multikolinearitas 31
3. Uji Heteroskedastisitas 32
4. Uji Autokorelasi 32
E. Analisis Data 33
1. Uji Statistik Deskriptif 33
2. Analisis Regresi Linear Berganda 34
3. Uji Koefisien Determinasi Berganda (*Adjusted* R-*squared*) 35
4. Uji Simultan (Uji F) 35
5. Uji Parsial (uji t) 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Deskripsi Subjek Penelitian 37
B. Deskripsi Objek Penelitian 39
C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data 46
1. Model Estimasi Data Panel 46
2. Analisis Pemilihan Regresi Data Panel 49
3. Uji Asumsi Klasik 52
D. Hasil Uji Analisis Data 60
1. Uji Statistik Deskriptif 60
2. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 63
3. Uji Koefisien Determinasi Berganda (*Adjusted R-Squared*) 64

4. Uji Simultan (Uji F) 65
5. Uji Parsial (Uji t) 66
E. Pembahasan 68
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 68
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 70
3. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 71
4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 73
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Keterbatasan dan Saran 76
1. Keterbatasan 76
2. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 92

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rangkuman Operasionalisasi Variabel.....30
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....38
Tabel 4.2 Daftar Daerah Otonomi di Provinsi Jawa Timur.....38
Tabel 4.3 Hasil Uji CEM.....47
Tabel 4.4 Hasil Uji FEM.....48
Tabel 4.5 Hasil Uji REM.....49
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....50
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman.....51
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....55
Tabel 4.9 Hasil Uji Korelasi.....56
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....58
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi.....59
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....60
Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....63
Tabel 4.14 Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....65
Tabel 4.15 Hasil Uji F.....66
Tabel 4.16 Hasil Uji t.....67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....23
Gambar 4.1 Grafik Tren Rasio PAD Periode Tahun 2019 s.d. 2023 40
Gambar 4.2 Grafik Tren Rasio Dana Perimbangan Periode Tahun 2019 s.d. 2023 42
Gambar 4.3 Grafik Tren Rasio Belanja Pegawai Periode Tahun 2019 s.d. 2023..43
Gambar 4.4 Grafik Tren Rasio Belanja Modal Periode Tahun 2019 s.d. 2023.....45
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Sebelum Tranformasi.....52
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas Data Sesudah Tranformasi.....54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 s.d. 2023
Lampiran 2. Data Dana Perimbangan Tahun 2018 s.d. 2023
Lampiran 3. Data Belanja Pegawai Tahun 2018 s.d. 2023
Lampiran 4. Data Belanja Modal Tahun 2018 s.d. 2023
Lampiran 5. Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2018 s.d. 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan republik dengan Presiden sebagai kepala negara. Dalam sistem kesatuan tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah yang lebih kecil, yaitu provinsi, yang kemudian terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Konstitusi tertinggi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi. Namun demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, tetap diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tujuan nasional secara bersama.

Ketentuan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tiga jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan pemerintahan umum. Pemerintah pusat memegang penuh urusan pemerintahan absolut seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan moneter. Sementara itu, pemerintah daerah memperoleh kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dapat dibagi antara pusat dan daerah berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan urusan konkuren tersebut adalah dalam hal pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah, yang dituangkan dalam instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD bukan sekadar dokumen formal, tetapi juga mencerminkan kemampuan fiskal dan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan program pembangunan daerah secara efektif.

Kekuatan struktur APBD menjadi salah satu indikator utama yang menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 27 ayat (1), struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau daerah lainnya, dan sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Sementara itu, belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selisih antara nilai pendapatan dan belanja daerah tersebut dalam APBD akan ditutup oleh pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran yang perlu dilakukan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas struktur APBD adalah kapasitas fiskal daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan secara mandiri, terutama PAD, untuk membiayai program pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat. Kapasitas fiskal yang kuat menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam konteks keuangan dan menjadi landasan penting dalam mewujudkan desentralisasi yang berkualitas.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 38 daerah otonom tingkat satu yang berlokasi di ujung timur Pulau Jawa. Sebagai provinsi yang menempati peringkat pertama provinsi terluas di Pulau Jawa dengan luas 47.803,49 km^2 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021), pada tahun 2024, provinsi ini merupakan salah satu provinsi dengan kapasitas APBD terbesar ketiga di Indonesia (Idris, 2024). Hal itu menunjukkan bahwa pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pendapatan tertinggi di Indonesia. Kekuatan struktur APBD ini dapat berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah yang mandiri ditunjukkan dengan kemampuannya memaksimalkan PAD menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai belanjanya sehingga

pemerintah daerah tersebut tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Malau dan Parapat, 2020). Selain itu, dengan pendapatan yang lebih besar, suatu daerah dapat memiliki ruang fiskal yang lebih lebar untuk mengalokasikan belanjanya. Terlebih lagi, dengan PAD yang besar, daerah cenderung dapat lebih mandiri secara finansial dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam belanjanya tanpa harus mempertimbangkan biaya kemudian atas pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga (Putri, Siboro, Safitri, dan Aulia, 2024).

Malau dan Parapat (2020) menekankan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber daya daerah tersebut. Maksimalisasi dan optimalisasi tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi atau bahkan tidak bergantung pada pihak eksternal daerah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Arpani dan Halmawati (2020). Maksimalisasi dan optimalisasi penggalian potensi sumber daya daerah tersebut tercermin dalam pendapatan asli daerah.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya oleh Malau dan Parapat (2020) yang menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara belanja modal justru menunjukkan pengaruh negatif. Pengembangan dalam penelitian ini ditandai dengan penambahan variabel baru, yaitu dana perimbangan, yang diambil dari hasil penelitian Arpani dan Halmawati (2020). Dalam penelitiannya, Arpani dan Halmawati (2020) menemukan bahwa dana perimbangan berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi satu variabel tambahan lainnya, yaitu belanja pegawai, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Fitriyani dan Suwarno (2021), yang menyimpulkan bahwa belanja pegawai memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan hasil temuan sebelumnya, peneliti terdorong untuk melanjutkan dan memperluas penelitian dengan mengambil judul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA PEGAWAI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**".

2. Identifikasi Masalah

Berpedoman pada latar belakang di atas, dapat diamati bahwa temuan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya konsisten. Sejumlah studi yang di antaranya dilakukan oleh Arpani dan Halmawati (2020), Handayani dan Erinos (2020), Machfud, Asnawi, dan Naz'aina (2020), Malau dan Parapat (2020), Fitriyani dan Suwarno (2021), serta Bilqis dan Priyono (2023) menunjukkan bahwa PAD menunjukkan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian Kusmila (2023) tidak menemukan bukti bahwa PAD meningkatkan kemandirian fiskal sehingga memunculkan perbedaan hasil yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pada variabel dana perimbangan, ketidaksepahaman serupa juga terjadi. Arpani dan Halmawati (2020) melaporkan pengaruh positif, sedangkan Machfud dkk. (2020) menemukan dampak negatif. Temuan lainnya, seperti yang disampaikan Ginting, Hamzah, dan Sofilda (2019), menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang bermakna. Hal sejalan dilaporkan oleh Saraswati dan Nurharjanti (2021) serta Zahidah dan Dientri (2023) yang sama-sama tidak menemukan bukti pengaruh negatif dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Variasi hasil penelitian juga tampak pada belanja pegawai dan belanja modal. Wahyuni dan Ardini (2018) menyimpulkan bahwa belanja pegawai berdampak negatif, tetapi Defitri (2020) serta Fitriyani dan Suwarno (2021) tidak menemukan dampak negatif yang signifikan. Sementara itu, belanja modal dilaporkan berdampak negatif oleh Defitri (2020), Malau dan Parapat (2020), serta Fitriyani dan Suwarno (2021). Namun, Sulistyawati, Illyasa, Santoso, Nugroho, dan Gusmao (2024) justru menemukan pengaruh positif. Penelitian lain

yang dilakukan oleh Wahyuni dan Ardini (2018), Handayani dan Erinos (2020), Bilqis dan Priyono (2023), serta Kusmila (2023) menunjukkan hasil bahwa belanja modal tidak menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Andriana (2020) pun dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak dietemukan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Inkonsistensi ini mempertegas urgensi penelitian lanjutan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada 39 pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan periode pengamatan selama lima tahun, yaitu mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Batasan wilayah dan waktu ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih terfokus dan mendalam mengenai dinamika fiskal di tingkat daerah dalam konteks implementasi otonomi daerah di provinsi dengan karakteristik ekonomi dan administratif yang beragam tersebut.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
2. Apakah dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
3. Apakah belanja pegawai memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
4. Apakah belanja modal memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah belanja pegawai memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah belanja modal memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, seperti:

1. Bagi pengembangan ilmu.

Penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi publik, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah, serta dapat dijadikan sebagai dasar referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat operasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi empiris yang dapat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalisasi potensi sumber daya daerahnya melalui pembentukan kebijakan fiskal daerah yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *1*(2), 105-113.

Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2373–2390.

Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, *7*(1), 1–25.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2021). *Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (km2), 2016-2020*. https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODEjMg==/luaswilayah-menurutkabupaten-kota.html

Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, *2*(2), 612–621.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.

Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, *19*(2), 107–119.

Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, *1*(1), 61–69.

Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *4*(2), 105–127.

Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics (4th edition)*. West Point: Gary Burke.

Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2348–2361.

Idris, M. (2024). *5 Daerah dengan APBD Terbesar di Indonesia, Jakarta Peringkat Pertama*. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2024/09/12/104203426/5-daerah-dengan-apbd-terbesar-di-indonesia-jakarta-peringkat-pertama

Isnowati, S., & Masdjojo, G. N. (2024). Analisis Kinerja Pendapatan Daerah dan Kemandirian Daerah pada Masa Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *8*(3), 113–126.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Kusmila, Z. (2023). Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(2), 9226–9234.

Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, *5*(1), 14.

Maharani, B., Puspitasari, A., & Yantiana, N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Berajah Journal*, *4*(4), 863–872.

Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, *3*(2), 332–337.

Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, *3*(2), 152–158.

Mubarak, R. (2021). *Pengantar Ekonometrika*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumban Tobing, C. E. R. (2021). *Penelitian Bisnis: Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS*. Medan: Madenatera.

Nauw, E. T. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(6), 1–17.

Pasaribu, B., Ahman, Muhtadi, H. F., Diba, S. F., Anggara, N., & Kanti, W. (2024). Kesalahan Umum dalam Analisis Data: Data Normal dan Tidak Normal. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(3), 2413–2418. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3706

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Perdana K., E. (2016). *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*. Bangka: LAB KOM MANAJEMEN FE UBB.

Putri, A. A., Siboro, S. F., Safitri, E., & Aulia, N. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *2*(3), 64–74.

Safitri, R. A., & Sriningsih, S. (2025). Analisis Overlay dan Elastisitas Potensi Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2022. *ECo-Buss: Economics and Business*, *7*(3).

Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *PROSIDING BIEMA: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, *2*, 51–64.

Setiawan, M., & Suhendah, R. (2021). Pengaruh Leverage, Firm Size, dan Growth Opportunity terhadap Earnings Response Coefficient. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, *3*(4), 1709–1718.

Sugiyanto, H., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, *5*(1), 20–36.

Sulistyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian Empiris Faktor-Faktor Penentu Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Bisnis Indonesia*, *5*(1), 23–35.

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *1*(1), 13–23.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Penadapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *7*(6), 1–16.

Yudiastuti, L. N., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting and Finance Management*, *6*(1), 51–69.

Zahidah, I., & Dientri, A. M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Manajemen Dan Akuntansi*, *14*(1), 1–18.